

PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN  
PEMBERDAYAAN KELUARGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS NASIONAL  
PROMOSI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI PENGASUHAN  
1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terlaksananya kegiatan proyek prioritas nasional promosi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan untuk percepatan penurunan *stunting* secara lebih terkoordinasi dan terarah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Proyek Prioritas Nasional Promosi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS NASIONAL PROMOSI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

Pasal 1

Petunjuk teknis proyek prioritas nasional promosi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dimaksudkan sebagai acuan bagi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional provinsi dalam pelaksanaan kegiatan promosi materi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengasuhan

1000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 2

Petunjuk teknis proyek prioritas nasional promosi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2023

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Soetriningsih

LAMPIRAN  
PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA  
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROYEK PRIORITAS  
NASIONAL PROMOSI DAN KOMUNIKASI,  
INFORMASI, DAN EDUKASI PENGASUHAN  
1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja namun juga menyangkut Keluarga Sejahtera. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan dilaksanakan dengan cara peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak. Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan *stunting* merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* mempunyai dampak yang merugikan dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi. Dalam jangka pendek, *stunting* terkait dengan perkembangan sel otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal dan pada jangka panjang akan menyebabkan kemampuan kognitif menjadi rendah, sehingga pada akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kejadian *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia sampai dengan saat ini. Berdasarkan hasil *Joint Child Malnutrition Estimates (JME)* antara UNICEF, WHO, dan *World Bank Group* pada April tahun 2021, sebanyak 149,2 juta anak balita di dunia mengalami *stunting* pada tahun 2020. Selain itu, lebih dari setengah jumlah anak balita tersebut, yaitu 53%, berasal dari Asia dan dengan perbandingan 2:5 anak, yaitu 41% berasal dari Afrika. Balita yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan.

BKKBN sebagai instansi yang mendapatkan amanah sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* memiliki tugas untuk mengoordinasikan dan mensinergikan penurunan angka *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. Peraturan Presiden ini menetapkan enam tujuan Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:

1. menurunkan prevalensi *Stunting*;
2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. memperbaiki pola asuh;
5. meningkatkan kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tersebut dirumuskan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* ke dalam 5 (lima) pilar meliputi:

1. Pilar pertama: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
2. Pilar kedua: Peningkatan Komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pilar ketiga: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; dan
4. Pilar keempat: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Pilar kelima: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi;

Kelima pilar tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Kementerian/Lembaga/ pihak pendukung.

Kerdil (*Stunting*) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

*Stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak Balita (bawah 2 tahun). Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau periode sejak anak dalam kandungan (270 hari) hingga seorang anak berusia 2 (dua) tahun (730 hari). Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* adalah praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan. Selain itu, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan ANC - *Antenatal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), *Post-Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas, masih kurangnya akses rumah

tangga/keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga menjadi faktor-faktor yang cenderung menyebabkan *stunting*.

Intervensi *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Intervensi Spesifik merupakan intervensi yang ditujukan, antara lain, kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Intervensi Sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi *stunting* ([kesmas.kemkes.go.id](http://kesmas.kemkes.go.id) diakses tanggal 9 Desember 2022).

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ditegaskan bahwa Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta menjadi Kegiatan Prioritas untuk mendukung Prioritas Nasional 3 yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. BKKBN mendukung hal tersebut dengan melakukan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai Pengasuhan 1000 HPK menjadi kegiatan untuk mendukung intervensi tersebut dengan target kegiatan adalah keluarga baduta yang terpapar 1000 HPK.

Sasaran Program Prioritas Promosi dan KIE 1000 HPK tahun 2023 mencakup 8.070.754 (Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat) keluarga dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan *stunting* untuk mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah/desa.
2. Peningkatan kapasitas pengelola program percepatan penurunan *stunting* bagi kader BKB;
3. Internalisasi pengasuhan Ibu Hamil dan Keluarga Baduta (bawah 2 tahun) dalam rangka percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat
4. Fasilitasi informasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* berbasis teknologi informasi;

5. Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE dalam rangka percepatan penurunan *stunting* melalui SIGA dan SMART;
6. Promosi dan KIE Pengasuhan Ibu Hamil dan Keluarga Baduta dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
7. Advokasi dan KIE Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Mitra Kerja.

Data jumlah Kabupaten/Kota lokasi intervensi kegiatan Promosi dan KIE 1000 HPK dari Tahun 2017 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Data Sasaran Keluarga Baduta di Kabupaten/Kota Lokasi Intervensi Tahun 2017 – Tahun 2022**

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Sasaran keluarga yang mempunyai baduta
1	2017	8	Belum ada target
2	2018	100	2.353.789
3	2019	160	2.831.614
4	2020	260	4.122.784
5	2021	360	4.122.784
6	2022	514	8.070.754

**Tabel 1.1 Data Sasaran Keluarga Baduta di Kabupaten/Kota Lokasi Intervensi Tahun 2023**

Tahun	Kabupaten/Kota	PUS Hamil	Keluarga Yang Punya Baduta	Jumlah Target
<b>2023</b>	<b>514</b>	<b>1.445.537</b>	<b>6.625.517</b>	<b>8.070.754</b>

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Acuan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka mempercepat penurunan *stunting*.

### 2. Tujuan

- a. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penentu kebijakan serta pengetahuan, sikap dan perilaku Ibu hamil dan keluarga yang mempunyai baduta (bawah dua tahun) melalui pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan *stunting* serta melalui integrasi edukasi yang

- melibatkan para pemangku kepentingan/penentu kebijakan serta mitra kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola dan pelaksana di lini lapangan (Penyuluh KB/PLKB, Kader BKB/kader sejenis dan pemangku kepentingan) tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK;
  - c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku Ibu hamil dan keluarga yang mempunyai baduta tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK di 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di kelompok BKB;
  - d. memfasilitasi penyediaan informasi tentang percepatan penurunan *stunting* melalui pengasuhan 1000 HPK berbasis teknologi informasi; dan
  - e. menyediakan data dan informasi perkembangan dan evaluasi kegiatan Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh BKKBN secara rutin setiap bulan melalui SIGA.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Indikator Keberhasilan
4. Pengertian
5. Sasaran
6. Kebijakan dan Strategi
7. Mekanisme Pelaksanaan
8. Pelaporan dan Monitoring Evaluasi
9. Penutup

### **D. Indikator Keberhasilan**

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelola dan pelaksana di lini lapangan (Penyuluh KB/PLKB dan Kader BKB)

- tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK di 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota;
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku keluarga yang mempunyai baduta tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK di 514 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di kelompok BKB;
  3. Tersedianya data keluarga yang mempunyai baduta yang terpapar promosi pengasuhan 1000 HPK melalui kelompok BKB di 514 Kabupaten/Kota;
  4. Terfasilitasinya informasi tentang percepatan penurunan *stunting* melalui pengasuhan 1000 HPK yang berbasis teknologi Informasi;
  5. Tersedianya laporan perkembangan dan evaluasi kegiatan Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh BKKBN secara rutin setiap bulan;
  6. Terlaporkannya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta pencapaian output melalui aplikasi E-Monev, Sismonev, Smart secara rutin setiap bulan dan per triwulan; dan
  7. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan 1000 HPK dalam rangka penurunan stunting.

#### **E. Pengertian**

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan atau yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah periode sejak anak dalam kandungan (270 hari) hingga seorang anak berusia 2 tahun (730 hari).
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

5. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
6. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
7. Prioritas Nasional merupakan koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional untuk menjaga kesinambungan antara RKP tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian didukung dengan pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan.
8. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan sasaran agar mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan, khususnya mengenai pengasuhan 1000 HPK.
9. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) adalah penyampaian isi pesan secara langsung/tidak langsung sampai pada proses perubahan perilaku yang positif khususnya dalam pengasuhan anak periode 1000 HPK menggunakan berbagai media.
10. Pengasuhan 1000 HPK adalah pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan perilaku dalam mendidik dan merawat anak untuk mendukung perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral anak sejak saat kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun.
11. Bina Keluarga Balita dan Anak yang selanjutnya disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
12. Kelompok BKB adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral.
13. Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara

sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua dan keluarga di kelompok BKB.

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
15. Keluarga yang memiliki baduta adalah keluarga yang memiliki anak di bawah 2 tahun atau umur 0-23 bulan.
16. Pengelola Proyek Prioritas Nasional yang selanjutnya disebut Pengelola Pro PN adalah orang atau lembaga yang melaksanakan rangkaian kegiatan Pro PN mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan penilaian Proyek Prioritas Nasional (OPDKB, PKB/PLKB, Kader BKB).
17. Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua dan keluarga di kelompok BKB.
18. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Bangga Kencana.
19. Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Bangga Kencana.
20. Pencatatan dan Pelaporan adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek dari pencapaian suatu program di lapangan.

## **F. Sasaran**

1. Sasaran Pengguna Juknis meliputi:  
Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia
2. Sasaran Kegiatan Pro PN Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Rangka Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. Orangtua/Keluarga yang memiliki anak yang berusia di bawah 2 tahun (baduta);
  - b. Ibu hamil; dan
  - c. Anggota BKB.
3. Sasaran Wilayah meliputi:
- a. Provinsi;
  - b. Kabupaten dan Kota;
  - c. Kecamatan; dan
  - d. Kelurahan/Desa.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Proyek Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024.

BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dalam Program Prioritas Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dan arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 Peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas dengan Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing. BKKBN dalam mendukung kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, melalui Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*.

Arah kebijakan bidang kesehatan untuk kegiatan percepatan penurunan *stunting*, yaitu percepatan peningkatan perbaikan gizi masyarakat khususnya penurunan *stunting* terutama pada periode 1000 HPK melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dan lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi dengan didukung bukti.

#### **A. Kebijakan**

Arah kebijakan Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Rangka Penurunan *Stunting*, sebagai berikut:

1. Peningkatan Komitmen dan jejaring pemangku kebijakan dan mitra kerja tentang pengasuhan 1000 HPK melalui BKB;

2. Penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi dengan lintas sektor;
3. Penguatan kelembagaan serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Ibu hamil dan keluarga yang mempunyai baduta melalui kelompok BKB;
4. Pemberian fasilitasi informasi tentang percepatan penurunan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK yang berbasis teknologi informasi;
5. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pro-PN; dan
6. Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting.

## **B. Strategi**

1. Melaksanakan sosialisasi dan Advokasi kepada pemangku kebijakan tentang promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK melalui pokja advokasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Percepatan Intervensi kegiatan sesuai dengan tupoksi K/L, *stakeholder*, dan mitra kerja yang terkait penanggulangan *stunting*;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan Pro-PN dan meningkatnya peran serta Masyarakat tentang Pengasuhan 1000 HPK;
4. Melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada keluarga yang memiliki baduta tentang pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting;
5. Melaksanakan fasilitasi informasi tentang program percepatan penurunan *stunting* melalui pengasuhan 1000 HPK yang berbasis teknologi informasi (*Virtual meeting*, sosialisasi melalui media sosial);
6. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK tahun 2022 berbasis teknologi informasi (*Virtual Meeting*, Rapat Pengendalian Program, *Whatsapp group*, email [ditbalnak.kspk@bkkbn.go.id](mailto:ditbalnak.kspk@bkkbn.go.id));
7. Melaksanakan Konsolidasi dengan Pemangku Kebijakan Tingkat Daerah, (sosialisasi promosi, edukasi, sarasehan) dengan mitra kerja melalui 18 (delapan belas) Provinsi yang telah ditetapkan.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE 1000 HPK dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:

##### **A. Perencanaan**

1. Target tahun 2023 adalah 8.070.754 (delapan juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat) ibu hamil dan keluarga yang memiliki baduta (bawah 2 tahun);
2. Penentuan wilayah sasaran kegiatan;
3. Rencana kegiatan dituangkan ke dalam RKAKL Perwakilan BKKBN Provinsi berdasarkan Struktur Program dan Anggaran yang disusun oleh unit kerja pengampu Pro PN dan Biro Perencanaan.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pro PN di tingkat provinsi dilakukan sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pro PN**

NO	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU (2023)	KETERANGAN
<b>PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN KELUARGA BALITA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING</b>							
1	Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting	Kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD	Pemangku kebijakan di daerah/desa	Sosialisasi, advokasi	Terbangunnya komitmen pemerintah daerah dan/atau desa tentang pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting	Januari s.d April, ditindaklanjuti pada bulan Oktober	Kegiatan ini dapat disinergikan dengan forum Rakerda, Musrembang yang ada di sasaran wilayah stunting
2	Peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader BKB	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaksana program percepatan penurunan stunting	Pengelola Pro PN di seluruh Kabupaten/Kota	<i>Workshop</i> dan/atau orientasi, secara daring maupun luring dengan memperhatikan protokol kesehatan	Tersedianya kader BKB yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting	Februari s.d April	Penyelenggaraan, Konsumsi, narasumber yang kegiatannya diawali dengan <i>pre test</i> dan diakhiri dengan <i>post test</i>
3	Internalisasi pengasuhan Baduta dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat	Memberikan informasi dan pemahaman kepada orangtua dan keluarga Baduta tentang pentingnya pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting	Orangtua keluarga baduta	Pertemuan <i>fullday</i> di tingkat kabupaten/kota dengan peserta keluarga Baduta	Memberikan informasi dan pemahaman kepada orangtua dan keluarga Baduta tentang pentingnya pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting	April s.d November	Orangtua dan keluarga baduta mampu melaksanakan pengasuhan 1000 HPK serta mampu memantau pertumbuhan anak menggunakan KMS dan memantau

NO	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU (2023)	KETERANGAN
							perkembangan anak menggunakan KKA dalam rangka percepatan penurunan stunting
4	Monev (Monitoring dan Evaluasi) pelaksanaan percepatan penurunan stunting berbasis IT	Menjaga keberlanjutan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK melalui promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK bagi keluarga yang memiliki baduta melalui informasi tentang percepatan penurunan <i>stunting</i>	Seluruh kabupaten/kota pelaksana proyek Prioritas Nasional 1000 HPK tahun 2023	Pembinaan ke kabupaten / kota	Terfasilitasinya informasi tentang kegiatan percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan pengasuhan 1000 HPK yang berbasis IT	Januari s.d November	
5	Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui SIGA, SMART	Tersedianya data realisasi anggaran dan pelaksanaan Pro-PN	Seluruh kabupaten/kota pelaksana Proyek Prioritas Nasional 1000 HPK tahun 2023	Penyusunan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan Pro PN	Laporan SIGA, SMART dan pelaksanaan kegiatan Pro – PN	Januari s.d Desember	

NO	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU (2023)	KETERANGAN
<b>PENINGKATAN KOMITMEN DENGAN PEMANGKU KEBIJAKAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING</b>							
1	Promosi dan KIE pengasuhan balita dalam rangka Percepatan penurunan Stunting	Meningkatkan komitmen dan pengetahuan mitra kerja dan pemangku kebijakan dalam pengasuhan 1000 HPK untuk percepatan penurunan stunting	1. pemangku kepentingan dan penentu kebijakan ( <i>stakeholders</i> ) di pusat, provinsi, kab/kota 2. Mitra kerja di pusat, provinsi, kab/kota	Penyelenggaraan sebagai pendamping kegiatan kemitraan	Tersosialisasikannya pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting	Januari – Desember	
2	Konsolidasi dengan Pemangku Kebijakan tingkat Daeran (Kemitraan)	Meningkatkan komitmen penentu kebijakan berjenjang dengan kegiatan sosialisasi promosi, edukasi, dan sarasehan integrasi edukasi yang melibatkan para pemangku kepentingan/penentu kebijakan serta mitra kerja di tingkat provinsi, kabupaten/kota	1. pemangku kepentingan dan penentu kebijakan ( <i>stakeholders</i> ) di pusat/provinsi/kab/kota 2. mitra kerja di pusat/provinsi/kab/kota 3. pengelola Program Bangga Kencana 4. kader BKB, keluarga yang memiliki baduta di kelompok BKB	Bentuk kegiatan pertemuan, sosialisasi, promosi, edukasi, saresehan dan keg lainnya (bisa menggabungkan kegiatan Pro PN lainnya seperti Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting atau kegiatan Internalisasi pengasuhan baduta dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat	Pelaporan hasil pelaksanaan, konsolidasi, dengan pemangku kebijakan daerah	Januari – Desember	Kegiatan ini dilaksanakan dengan mitra legislatif

## **B. Pelaksanaan**

### 1. BKKBN

BKKBN dalam hal ini Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak sebagai penanggung jawab Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk Teknis Pro PN Promosi dan KIE 1000 HPK melalui Peraturan Deputi;
- b. Menyiapkan *prototype* materi dan media KIE 1000 HPK dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak melalui Spesifikasi BKB Kit Stunting DAK Non Fisik Sub Bidang KB;
- c. Koordinasi lintas sektor dengan Bappenas, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan segmentasi sasaran (data basis stunting);
- d. Pemantauan dan evaluasi dengan tujuan pembinaan pelaksanaan Pro PN di tingkat provinsi dengan melakukan *video conference* (vicon), *virtual meeting* (Zoom, Webex), whatsapp Group, Email [Ditbalnak.kspk@gmail.com](mailto:Ditbalnak.kspk@gmail.com), dan Rapat Pengendalian Program (Radalgram) yang dilaksanakan setiap bulan dan kunjungan lapangan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pro PN per triwulan dan setiap tahun untuk dilaporkan ke Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Biro Perencanaan BKKBN dan Menyusun Capaian RKP per triwulan.

### 2. Perwakilan BKKBN Provinsi

Perwakilan BKKBN Provinsi dalam hal ini adalah Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dapat berkoordinasi dengan bidang lain di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi dan pokja advokasi daerah untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting, agar kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama

Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD/APBDes, kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka atau pertemuan langsung dan/ atau melalui *virtual meeting*.

- b. Pemantauan dan Evaluasi Pro PN kabupaten/kota di wilayahnya melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Menyusun jadwal pemantauan dan evaluasi secara berkala;
  - 2) Melaporkan realisasi kegiatan melalui Aplikasi Smart dan E-Monev yang berkoordinasi dengan Kasubag Perencanaan dan melakukan penginputan **paling lambat tanggal 10 setiap bulannya**;
  - 3) Menyusun laporan tahunan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- c. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pro PN
  - 1) Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola Pro PN;
  - 2) Sasaran kegiatan ini adalah Pengelola Pro PN (OPDKB, PKB/PLKB, Kader BKB);
  - 3) Bentuk Kegiatan berupa *workshop* dengan materi pengenalan dan penerapan Modul BKB EMAS. Adapun buku saku Pengasuhan 1000 HPK dan buku Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter 8 (delapan) Fungsi Keluarga dijadikan sebagai referensi tambahan;
  - 4) Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka atau pertemuan langsung dan/ atau melalui *virtual meeting*.
- d. Internalisasi Pengasuhan Baduta (bawah 2 tahun) dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat
  - 1) Tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada orangtua keluarga baduta (bawah 2 tahun) tentang pentingnya Pengasuhan 1000 HPK dalam percepatan penurunan stunting;
  - 2) Sasaran kegiatan ini adalah ibu hamil dan keluarga dengan baduta.
  - 3) Bentuk kegiatan berupa pertemuan *fullday* dan sosialisasi melalui berbagai media (koordinasi dengan bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Provinsi) di tingkat

Kabupaten/Kota dengan peserta keluarga yang mempunyai baduta.

- 4) Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka atau pertemuan langsung dan/ atau melalui *virtual meeting*.
  - a) Referensi materi untuk kegiatan Internalisasi terdiri dari: Buku saku Pengasuhan 1000 HPK, Buku Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 (delapan) Fungsi Keluarga, Modul BKB EMAS, Permainan Ular Tangga, Kalender Pengasuhan 1000 HPK, Kartu Kembang Anak *Online* (<https://kkaonline.bkkbn.go.id>), dan Buku Pembentukan Karakter Anak Usia 0-6 Tahun dan 6-10 Tahun
  - b) Media KIE terdiri dari: media cetak, media elektronik, dan media sejenis lainnya. Referensi materi dan dan media KIE dapat diunduh di <https://cis.bkkbn.go.id/kspk/>
- e. Fasilitasi informasi tentang percepatan penurunan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK berbasis teknologi informasi (webinar, menggunakan media sosial, dan media lainnya)
- f. Pelaporan data Pro PN Promosi dan KIE melalui SIGA, SMART dan Pelaksanaan Kegiatan Pro-PN
- g. Promosi dan KIE Pengasuhan Balita dalam Percepatan Penurunan *Stunting* dan Advokasi dan KIE Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Mitra Kerja di 18 (delapan belas) Provinsi sebagai berikut:
  - 1) Provinsi Jawa Barat
  - 2) Provinsi Jawa Tengah
  - 3) Provinsi Jawa Timur
  - 4) Provinsi Sumatera Barat
  - 5) Provinsi Sumatera Utara
  - 6) Provinsi Sumatera Selatan
  - 7) Provinsi Jambi
  - 8) Provinsi Bengkulu
  - 9) Provinsi Lampung
  - 10) Provinsi Sulawesi Selatan
  - 11) Provinsi Sulawesi Utara

- 12) Provinsi Sulawesi Barat
- 13) Provinsi Kalimantan Barat
- 14) Provinsi Kalimantan Utara
- 15) Provinsi Bali
- 16) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 17) Provinsi DKI Jakarta
- 18) Provinsi Papua Barat

Dengan Kegiatan meliputi:

- 1) Koordinasi dengan bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi dan pokja advokasi daerah untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan *stunting*, agar kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan *stunting* dapat dialokasikan dalam APBD/APBDes; atau
- 2) Internalisasi pengasuhan Baduta dalam rangka percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat. Materi dapat diunduh di <https://cis.bkkbn.go.id> atau website <https://www.orangtuahebat.id/>
- 3) Peningkatan Kapasitas Pengelola Pro PN
  - a) Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola Pro PN;
  - b) Sasaran kegiatan ini adalah Pengelola Proyek Prioritas Nasional di Kabupaten/Kota/kecamatan/desa (OPDKB, PKB/PLKB, Kader BKB);
  - c) Bentuk Kegiatan berupa *workshop* dengan materi pengenalan dan penerapan Modul BKB EMAS. Adapun buku saku Pengasuhan 1000 HPK dan buku Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter 8 (delapan) Fungsi Keluarga dijadikan sebagai referensi lain
  - d) Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka atau pertemuan langsung dan/atau melalui *virtual meeting*.

- 4) Bentuk Kegiatan berupa pertemuan *fullday* dan sosialisasi melalui berbagai media (koordinasi dengan bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Provinsi) di tingkat kabupaten/kota dengan peserta keluarga yang mempunyai baduta dan balita.
- 5) Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka atau pertemuan langsung dan/ atau melalui *virtual meeting*.

### **C. Pembiayaan**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Satker Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan target ditetapkan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Petunjuk Teknis Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 merupakan acuan untuk merealisasikan kegiatan dan anggaran Proyek Prioritas Nasional di tahun 2023. Petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dipahami sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Struktur Program Dan Anggaran Tahun 2023. Kegiatan yang dikembangkan di daerah dapat disesuaikan dengan petunjuk teknis ini.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sosialisasi dan penerapan pengasuhan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada pengelola dan pelaksana BKB serta keluarga yang memiliki baduta.

Selanjutnya, semoga Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting yang menjadi kewenangan BKKBN ini dapat memberikan sumbangsih terhadap penurunan stunting di Indonesia melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dalam upaya tercapainya generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkarakter di masa mendatang.

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro ~~Humas~~ Organisasi, dan Tata Laksana



**ANAK LAMPIRAN 1**  
**JUMLAH KELUARGA IBU HAMIL DAN BADUTA DI 514 KABUPATEN/KOTA SERTA**  
**TARGET PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023**

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
ACEH	1	ACEH BESAR	3.565	14517	18.082
	2	PIDIE	3.746	14335	18.081
	3	ACEH UTARA	5.317	19373	24.690
	4	ACEH TIMUR	3.890	14534	18.424
	5	ACEH TENGAH	1.724	8102	9.826
	6	ACEH BARAT	1.423	5927	7.350
	7	ACEH SELATAN	1.844	7361	9.205
	8	ACEH TENGGARA	1.712	5940	7.652
	9	KOTA BANDA ACEH	1.660	7393	9.053
	10	KOTA SABANG	345	2174	2.519
	11	ACEH SINGKIL	1.039	4304	5.343
	12	SIMEULUE	843	3428	4.271

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	13	BIREUEN	3.563	16993	20.556
	14	KOTA LHOKSEUMAWE	1.384	6327	7.711
	15	KOTA LANGSA	1.118	5009	6.127
	16	ACEH BARAT DAYA	1.587	6151	7.738
	17	GAYO LUES	969	4143	5.112
	18	ACEH JAYA	872	3822	4.694
	19	NAGAN RAYA	1.254	4714	5.968
	20	ACEH TAMIANG	2.398	10325	12.723
	21	BENER MERIAH	1.405	5665	7.070
	22	KOTA SUBULUSSALAM	1.048	4665	5.713
	23	PIDIE JAYA	1.444	5883	7.327
		<b>TOTAL</b>	<b>44.150</b>	<b>181085</b>	<b>225.235</b>
<b>SUMATERA UTARA</b>	1	DELI SERDANG	8.519	46283	54802
	2	LANGKAT	5.062	29545	34607
	3	KARO	1.759	9328	11087
	4	SIMALUNGUN	4.327	23655	27982

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	5	ASAHAN	4.197	21055	25252
	6	LABUHANBATU	2.501	11810	14311
	7	TAPANULI TENGAH	2.048	9786	11834
	8	TAPANULI SELATAN	2.091	9305	11396
	9	TAPANULI UTARA	1.623	9118	10741
	10	NIAS	755	3460	4215
	11	DAIRI	1.380	8050	9430
	12	KOTA MEDAN	6.075	33414	39489
	13	KOTA PEMATANG SIANTAR	887	5738	6625
	14	KOTA TANJUNG BALAI	1.032	6232	7264
	15	KOTA BINJAI	1.235	7671	8906
	16	KOTA TEBING TINGGI	899	5355	6254
	17	KOTA SIBOLGA	436	3116	3552
	18	MANDAILING NATAL	2.886	12677	15563
	19	TOBA SAMOSIR	1.080	6021	7101
	20	KOTA PADANGSIDIMPUAN	1.284	7044	8328
	21	HUMBANG HASUNDUTAN	1.070	6938	8008
	22	PAKPAK BHARAT	381	2832	3213
	23	SAMOSIR	824	4050	4874
	24	SERDANG BEDAGAI	3.374	17189	20563
	25	BATU BARA	2.189	12737	14926
	26	PADANG LAWAS	2.018	7906	9924
	27	PADANG LAWAS UTARA	1.711	7112	8823
	28	NIAS SELATAN	1.967	7006	8973
	29	LABUHANBATU SELATAN	1.492	6519	8011

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	30	LABUHANBATU UTARA	1.921	9468	11389
	31	NIAS UTARA	766	4239	5005
	32	NIAS BARAT	382	2576	2958
	33	KOTA GUNUNGSITOLI	549	4683	5232
	<b>TOTAL</b>		<b>68.720</b>	<b>361917</b>	<b>430637</b>
<b>SUMATERA BARAT</b>	1	AGAM	3.286	7630	10916
	2	PASAMAN	2.137	4500	6637
	3	LIMA PULUH KOTA	2.851	6528	9379
	4	SOLOK	2.773	6242	9015
	5	PADANG PARIAMAN	2.621	5694	8315
	6	PESISIR SELATAN	3.546	7089	10635
	7	TANAH DATAR	2.410	5454	7864
	8	SIJUNJUNG	1.930	4279	6209
	9	KOTA BUKITTINGGI	701	1966	2667
	10	KOTA PADANG	4.416	9870	14286
	11	KOTA SAWAHLUNTO	467	1299	1766
	12	KOTA PADANG PANJANG	424	1251	1675
	13	KOTA SOLOK	648	1671	2319
	14	KOTA PAYAKUMBUH	970	2409	3379
	15	KEPULAUAN MENTAWAI	298	1119	1417
	16	KOTA PARIAMAN	711	1700	2411
	17	PASAMAN BARAT	2.946	6323	9269
	18	SOLOK SELATAN	1.274	2836	4110
	19	DHARMASRAYA	1.724	3859	5583
	<b>TOTAL</b>		<b>36.133</b>	<b>81718</b>	<b>117851</b>

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
<b>RIAU</b>	1	KAMPAR	5.595	9012	14607
	2	INDRAGIRI HILIR	2.919	4381	7300
	3	BENGKALIS	3.220	5220	8440
	4	INDRAGIRI HULU	2.108	3012	5120
	5	KOTA PEKANBARU	5.159	8659	13818
	6	KOTA DUMAI	2.347	3603	5950
	7	PELALAWAN	1.950	2529	4479
	8	ROKAN HULU	3.010	4022	7032
	9	ROKAN HILIR	3.241	5081	8322
	10	SIAK	2.339	3148	5487
	11	KUANTAN SINGINGI	2.213	3497	5710
	12	KEPULAUAN MERANTI	1.106	2142	3248
	<b>TOTAL</b>		<b>35.207</b>	<b>54305</b>	<b>89512</b>
<b>JAMBI</b>	1	BATANGHARI	1.954	6585	8539
	2	BUNGO	2.536	7973	10509
	3	KERINCI	1.729	5655	7384
	4	TANJUNG JABUNG BARAT	1.960	6768	8728
	5	MERANGIN	3.058	8879	11937
	6	KOTA JAMBI	2.300	8926	11226
	7	MUARO JAMBI	2.710	9070	11780
	8	TEBO	2.285	6929	9214
	9	TANJUNG JABUNG TIMUR	1.493	4927	6420
	10	SAROLANGUN	2.158	6400	8558
	11	KOTA SUNGAI PENUH	547	2079	2626
	<b>TOTAL</b>		<b>22.730</b>	<b>74192</b>	<b>96922</b>

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
<b>SUMATERA SELATAN</b>	1	MUSI BANYUASIN	3.487	12528	16015
	2	OGAN KOMERING ILIR	4.906	18582	23488
	3	OGAN KOMERING ULU	1.543	7667	9210
	4	MUARA ENIM	3.459	15808	19267
	5	LAHAT	2.736	11500	14236
	6	MUSI RAWAS	2.656	10988	13644
	7	KOTA PALEMBANG	5.956	26442	32398
	8	BANYUASIN	4.727	19635	24362
	9	KOTA PRABUMULIH	1.128	5249	6377
	10	KOTA PAGAR ALAM	919	4160	5079
	11	KOTA LUBUK LINGGAU	1.046	4991	6037
	12	OGAN ILIR	2.581	11219	13800
	13	OGAN KOMERING ULU TIMUR	3.510	12151	15661
	14	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1.765	6371	8136
	15	EMPAT LAWANG PENUKAL ABAB LEMATANG	1.441	6214	7655
	16	ILIR	1.295	5803	7098
	17	MUSI RAWAS UTARA	1.095	4729	5824
		<b>TOTAL</b>	<b>44.250</b>	<b>184036</b>	<b>228286</b>
<b>BENGKULU</b>	1	BENGKULU UTARA	2.109	5320	7429
	2	BENGKULU SELATAN	1.015	2774	3789
	3	REJANG LEBONG	1.311	3653	4964
	4	KOTA BENGKULU	1.906	4342	6248
	5	MUKO MUKO	1.612	3584	5196

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	6	KAUR	978	2463	3441
	7	SELUMA	1.364	3542	4906
	8	KEPAHIANG	721	1682	2403
	9	LEBONG	715	1760	2475
	10	BENGKULU TENGAH	864	2361	3225
	<b>TOTAL</b>		<b>12.595</b>	<b>31482</b>	<b>44077</b>
<b>LAMPUNG</b>	1	LAMPUNG SELATAN	6.836	26208	33044
	2	LAMPUNG TENGAH	4.919	20111	25030
	3	LAMPUNG UTARA	3.195	14037	17232
	4	KOTA BANDAR LAMPUNG	3.844	17264	21108
	5	LAMPUNG BARAT	1.449	5575	7024
	6	TULANG BAWANG	2.175	7470	9645
	7	TANGGAMUS	3.751	15210	18961
	8	KOTA METRO	736	3379	4115
	9	LAMPUNG TIMUR	5.022	19436	24458
	10	WAY KANAN	2.924	11453	14377
	11	PESAWARAN	2.889	11697	14586
	12	PRINGSEWU	2.499	9984	12483
	13	MESUJI	988	3580	4568
	14	TULANG BAWANG BARAT	1.560	4938	6498
	15	PESISIR BARAT	832	3158	3990
	<b>TOTAL</b>		<b>43.619</b>	<b>173499</b>	<b>217118</b>
<b>JAWA BARAT</b>	1	BEKASI	18.685	83979	102664
	2	KARAWANG	12.196	56460	68656
	3	PURWAKARTA	6.837	31705	38542

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	4	BOGOR	35.637	154089	189726
	5	SUKABUMI	21.010	86099	107109
	6	CIANJUR	20.319	88528	108847
	7	BANDUNG	24.397	114234	138631
	8	BANDUNG BARAT	14.372	62673	77045
	9	SUMEDANG	8.918	38896	47814
	10	GARUT	21.658	92239	113897
	11	TASIKMALAYA	12.633	56709	69342
	12	CIAMIS	9.130	37892	47022
	13	CIREBON	14.667	68480	83147
	14	KUNINGAN	7.971	35975	43946
	15	INDRAMAYU	8.328	36313	44641
	16	MAJALENGKA	9.385	41701	51086
	17	SUBANG	8.897	40212	49109
	18	KOTA BANDUNG	11.614	56374	67988
	19	KOTA CIREBON	1.809	8960	10769
	20	KOTA BOGOR	5.158	25345	30503
	21	KOTA SUKABUMI	2.482	10870	13352
	22	KOTA BEKASI	10.758	51696	62454
	23	KOTA DEPOK	9.400	47482	56882
	24	KOTA CIMAHI	3.166	13914	17080
	25	KOTA TASIKMALAYA	5.175	23065	28240
	26	KOTA BANJAR	1.632	6868	8500
	27	PANGANDARAN	3.261	13019	16280
		<b>TOTAL</b>	<b>309.495</b>	<b>1383773</b>	<b>1693268</b>

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
<b>JAWA TENGAH</b>	1	BANYUMAS	11.749	66667	78416
	2	PURBALINGGA	6.984	42571	49555
	3	CILACAP	12.378	71328	83706
	4	BANJARNEGARA	6.347	37662	44009
	5	MAGELANG	7.016	43435	50451
	6	TEMANGGUNG	4.953	29004	33957
	7	WONOSOBO	5.921	31856	37777
	8	PURWOREJO	4.040	24471	28511
	9	KEBUMEN	8.800	49969	58769
	10	PEKALONGAN	7.156	43096	50252
	11	PEMALANG	10.059	60808	70867
	12	TEGAL	10.599	63606	74205
	13	BREBES	12.621	71976	84597
	14	SEMARANG	5.180	37310	42490
	15	KENDAL	6.025	36768	42793
	16	DEMAK	6.310	40684	46994
	17	GROBOGAN	8.435	52557	60992
	18	PATI	5.262	38538	43800
	19	JEPARA	7.400	43329	50729
	20	REMBANG	3.653	23886	27539
	21	BLORA	4.490	29014	33504
	22	KUDUS	3.324	26544	29868
	23	KLATEN	6.125	39961	46086
	24	BOYOLALI	6.064	39441	45505
	25	SRAGEN	4.264	30209	34473

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	26	SUKOHARJO	4.858	30443	35301
	27	KARANGANYAR	4.884	32217	37101
	28	WONOGIRI	5.297	32086	37383
	29	BATANG	5.651	33625	39276
	30	KOTA SEMARANG	6.896	45731	52627
	31	KOTA SURAKARTA	2.102	14531	16633
	32	KOTA PEKALONGAN	1.611	10112	11723
	33	KOTA MAGELANG	421	3581	4002
	34	KOTA TEGAL	1.414	9388	10802
	35	KOTA SALATIGA	779	5629	6408
	<b>TOTAL</b>		<b>209.068</b>	<b>1292034</b>	<b>1501102</b>
<b>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	1	BANTUL	5.659	11171	16830
	2	SLEMAN	5.294	11393	16687
	3	GUNUNG KIDUL	3.967	7836	11803
	4	KULON PROGO	2.528	4745	7273
	5	KOTA YOGYAKARTA	1.272	2857	4129
	<b>TOTAL</b>		<b>18.720</b>	<b>38002</b>	<b>56722</b>
<b>JAWA TIMUR</b>	1	GRESIK	6.929	46976	53905
	2	SIDOARJO	8.757	63984	72741
	3	MOJOKERTO	5.837	40727	46564
	4	JOMBANG	7.149	49718	56867
	5	BOJONEGORO	6.491	44897	51388
	6	TUBAN	5.729	39520	45249
	7	LAMONGAN	5.625	41364	46989

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	8	MADIUN	3.146	22425	25571
	9	NGAWI	3.600	26690	30290
	10	MAGETAN	3.342	22779	26121
	11	PONOROGO	4.100	29845	33945
	12	PACITAN	2.586	18799	21385
	13	KEDIRI	8.751	60567	69318
	14	NGANJUK	6.003	39375	45378
	15	BLITAR	6.234	43919	50153
	16	TULUNGAGUNG	4.498	33700	38198
	17	TRENGGALEK	3.495	24893	28388
	18	MALANG	14.313	101292	115605
	19	PASURUAN	8.424	60595	69019
	20	PROBOLINGGO	7.081	43051	50132
	21	LUMAJANG	5.097	35470	40567
	22	BONDOWOSO	4.195	27984	32179
	23	SITUBONDO	3.410	21632	25042
	24	JEMBER	11.389	74658	86047
	25	BANYUWANGI	7.961	53873	61834
	26	PAMEKASAN	3.918	20911	24829
	27	SAMPANG	3.998	17966	21964
	28	SUMENEP	3.609	21383	24992
	29	BANGKALAN	3.704	16901	20605
	30	KOTA SURABAYA	8.499	67585	76084
	31	KOTA MADIUN	642	5474	6116
	32	KOTA PROBOLINGGO	1.199	9438	10637

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	33	KOTA BLITAR	727	5206	5933
	34	KOTA KEDIRI	1.107	8641	9748
	35	KOTA MOJOKERTO	497	4534	5031
	36	KOTA MALANG	2.966	24180	27146
	37	KOTA PASURUAN	1.150	8509	9659
	38	KOTA BATU	1.019	7863	8882
	<b>TOTAL</b>		<b>187.177</b>	<b>1287323</b>	<b>1474500</b>
<b>BALI</b>	1	BULELENG	3.581	27604	31185
	2	JEMBRANA	1.374	11263	12637
	3	TABANAN	1.882	14549	16431
	4	BADUNG	1.493	14479	15972
	5	GIANYAR	2.081	17688	19769
	6	KLUNGKUNG	1.030	8397	9427
	7	BANGLI	1.305	10348	11653
	8	KARANGASEM	2.231	16301	18532
	9	KOTA DENPASAR	1.150	11930	13080
	<b>TOTAL</b>		<b>16.127</b>	<b>132559</b>	<b>148.686</b>
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	1	LOMBOK BARAT	7.192	10627	17.819
	2	LOMBOK TENGAH	10.461	15785	26.246
	3	LOMBOK TIMUR	14.009	20200	34.209
	4	SUMBAWA	2.951	4381	7.332

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	5	DOMPU	2.054	2896	4.950
	6	BIMA	3.848	5213	9.061
	7	KOTA MATARAM	2.560	4442	7.002
	8	KOTA BIMA	1.088	1824	2.912
	9	SUMBAWA BARAT	1.080	1919	2.999
	10	LOMBOK UTARA	2.544	3594	6.138
		<b>TOTAL</b>	<b>47.787</b>	<b>70880</b>	<b>118.667</b>
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	1	SUMBA TIMUR	846	2505	3.351
	2	SUMBA BARAT	783	1899	2.682
	3	MANGGARAI	2.432	4860	7.292
	4	NGADA	822	1786	2.608
	5	ENDE	1.089	2887	3.976
	6	SIKKA	1.551	3546	5.097
	7	FLORES TIMUR	1.167	2996	4.163

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	8	KUPANG	1.766	4222	5.988
	9	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	1.782	4720	6.502
	10	TIMOR TENGAH UTARA	1.356	3210	4.566
	11	BELU	1.171	2858	4.029
	12	ALOR	1.241	2703	3.944
	13	KOTA KUPANG	1.159	3109	4.268
	14	LEMBATA	669	1656	2.325
	15	ROTE NDAO	857	2115	2.972
	16	MANGGARAI BARAT	1.880	3552	5.432
	17	NAGEKEO	806	1875	2.681
	18	SUMBA BARAT DAYA	2.602	4393	6.995
	19	SUMBA TENGAH	527	1145	1.672
	20	MANGGARAI TIMUR	2.271	3830	6.101
	21	SABU RAIJUA	447	1362	1.809

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	22	MALAKA	967	2590	3.557
	<b>TOTAL</b>		<b>28.191</b>	<b>63818</b>	<b>92.009</b>
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	1	MEMPAWAH	992	2560	3.552
	2	SAMBAS	4.082	10112	14.194
	3	KETAPANG	1.677	4300	5.977
	4	SANGGAU	1.668	4449	6.117
	5	SINTANG	1.919	4365	6.284
	6	KAPUAS HULU	1.102	3179	4.281
	7	KOTA PONTIANAK	1.795	4639	6.434
	8	BENGKAYANG	1.278	3061	4.339
	9	LANDAK	1.994	4655	6.649
	10	KOTA SINGKAWANG	1.129	2588	3.717
	11	MELAWI	831	2145	2.976
	12	SEKADAU	1.327	2636	3.963

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	13	KAYONG UTARA	753	1662	2.415
	14	KUBU RAYA	2.835	6165	9.000
	<b>TOTAL</b>		<b>23.382</b>	<b>56516</b>	<b>79.898</b>
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	1	KAPUAS	1.353	4600	5.953
	2	BARITO UTARA	672	2542	3.214
	3	BARITO SELATAN	578	2586	3.164
	4	KOTAWARINGIN BARAT	1.183	4534	5.717
	5	KOTAWARINGIN TIMUR	1.974	6697	8.671
	6	KOTA PALANGKARAYA	723	3064	3.787
	7	PULANG PISAU	899	1973	2.872
	8	GUNUNG MAS	710	2838	3.548
	9	MURUNG RAYA	749	2793	3.542
	10	BARITO TIMUR	478	2145	2.623
	11	SUKAMARA	395	1902	2.297

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	12	LAMANDAU	490	2120	2.610
	13	SERUYAN	780	2406	3.186
	14	KATINGAN	578	2887	3.465
	<b>TOTAL</b>		<b>11.562</b>	<b>43087</b>	<b>54.649</b>
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	1	BARITO KUALA	1.842	7507	9.349
	2	BANJAR	2.681	11201	13.882
	3	HULU SUNGAI TENGAH	1.788	6543	8.331
	4	HULU SUNGAI SELATAN	1.535	6446	7.981
	5	HULU SUNGAI UTARA	1.758	6739	8.497
	6	KOTABARU	1.674	6151	7.825
	7	TANAH LAUT	2.200	8817	11.017
	8	TAPIN	1.183	4836	6.019
	9	TABALONG	1.716	7622	9.338
	10	KOTA BANJARMASIN	2.289	9418	11.707

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	11	KOTA BANJARBARU	1.125	4802	5.927
	12	TANAH BUMBU	2.009	7896	9.905
	13	BALANGAN	1.103	4308	5.411
	<b>TOTAL</b>		<b>22.903</b>	<b>92285</b>	<b>115.188</b>
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	1	KUTAI KARTANEGARA	3.816	10828	14644
	2	BERAU	1.535	4142	5677
	3	PASER	1.501	4631	6132
	4	KOTA BALIKPAPAN	3.452	11891	15343
	5	KOTA SAMARINDA	3.161	10115	13276
	6	KOTA BONTANG	1.101	3708	4809
	7	KUTAI BARAT	858	3105	3963
	8	KUTAI TIMUR	1.732	5171	6903
	9	PENAJAM PASER UTARA	982	3421	4403
	10	MAHAKAM ULU	80	672	752
	<b>TOTAL</b>		<b>18.218</b>	<b>57684</b>	<b>75902</b>
<b>KALIMANTAN UTARA</b>	1	BULUNGAN	825	2481	3306
	2	KOTA TARAKAN	1.006	2940	3946
	3	NUNUKAN	784	2689	3473
	4	MALINAU	252	965	1217
	5	TANA TIDUNG	175	716	891
	<b>TOTAL</b>		<b>3.042</b>	<b>9792</b>	<b>12834</b>

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
<b>SULAWESI UTARA</b>	1	KEPULAUAN SANGIHE	368	3124	3492
	2	MINAHASA	1.064	6578	7642
	3	BOLAANG MONGONDOW	1.152	6601	7753
	4	MINAHASA SELATAN	888	5861	6749
	5	KOTA MANADO	649	4196	4845
	6	KOTA TOMOHON	312	2502	2814
	7	KOTA BITUNG	630	3999	4629
	8	KEPULAUAN TALAUD	235	2337	2572
	9	MINAHASA UTARA	896	5520	6416
	10	KOTA KOTAMOBAGU BOLAANG MONGONDOW	434	2903	3337
	11	UTARA KEP. SIAU TAGULANDANG	453	2558	3011
	12	BIARO	193	1557	1750
	13	MINAHASA TENGGARA BOLAANG MONGONDOW	452	3242	3694
	14	TIMUR BOLAANG MONGONDOW	453	2905	3358
	15	SELATAN	465	2917	3382
	<b>TOTAL</b>		<b>8.644</b>	<b>56800</b>	<b>65444</b>
<b>SULAWESI TENGAH</b>	1	TOLI TOLI	1.598	7103	8701
	2	DONGGALA	1.929	9356	11285
	3	POSO	1.263	5583	6846
	4	BANGGAI	2.003	9506	11509
	5	KOTA PALU	1.507	7518	9025
	6	BANGGAI KEPULAUAN	696	3969	4665

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	7	BUOL	1.300	5239	6539
	8	MOROWALI	1.043	4535	5578
	9	PARIGI MOUTONG	2.490	11926	14416
	10	TOJO UNA UNA	808	4180	4988
	11	SIGI	1.488	6871	8359
	12	BANGGAI LAUT	484	2601	3085
	13	MOROWALI UTARA	728	3099	3827
	<b>TOTAL</b>		<b>17.337</b>	<b>81486</b>	<b>98823</b>
<b>SULAWESI SELATAN</b>	1	LUWU	1.801	7675	9476
	2	TANA TORAJA	1.068	4949	6017
	3	PINRANG	2.102	8890	10992
	4	ENREKANG	1.332	5402	6734
	5	SIDENRENG RAPPANG	1.501	6391	7892
	6	WAJO	1.918	7840	9758
	7	SOPPENG	1.137	5115	6252
	8	BARRU	1.212	5158	6370
	9	PANGKAJENE KEPULAUAN	2.464	9651	12115
	10	BONE	3.265	15586	18851
	11	MAROS	3.012	11042	14054
	12	GOWA	5.262	20369	25631
	13	SINJAI	1.415	5781	7196
	14	BULUKUMBA	2.374	9442	11816
	15	BANTAENG	1.451	5623	7074
	16	JENEPONTO	2.192	8712	10904
	17	TAKALAR	2.657	9765	12422

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	18	KEPULAUAN SELAYAR	784	3678	4462
	19	KOTA MAKASSAR	5.446	21459	26905
	20	KOTA PARE PARE	829	3806	4635
	21	LUWU UTARA	1.604	7349	8953
	22	KOTA PALOPO	1.078	5056	6134
	23	LUWU TIMUR	2.087	8390	10477
	24	TORAJA UTARA	1.268	5855	7123
	<b>TOTAL</b>		<b>49.259</b>	<b>202986</b>	<b>252245</b>
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	1	KOLAKA	1.573	7475	9048
	2	KONAWE	1.772	9158	10930
	3	MUNA	1.116	6158	7274
	4	BUTON	1.002	4594	5596
	5	KOTA KENDARI	1.429	6683	8112
	6	KOTA BAU BAU	965	5064	6029
	7	KONAWE SELATAN	2.341	11553	13894
	8	KOLAKA UTARA	863	4026	4889
	9	WAKATOBI	735	4025	4760
	10	BOMBANA	1.180	5360	6540
	11	KONAWE UTARA	514	2446	2960
	12	BUTON UTARA	610	3146	3756
	13	KOLAKA TIMUR	719	3305	4024
	14	KONAWE KEPULAUAN	288	1935	2223
	15	MUNA BARAT	613	3249	3862
	16	BUTON TENGAH	879	4321	5200
	17	BUTON SELATAN	702	4105	4807

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	<b>TOTAL</b>		<b>17.301</b>	<b>86602</b>	<b>103903</b>
<b>MALUKU</b>	1	MALUKU TENGAH	1.651	9784	11435
	2	MALUKU TENGGARA	441	3072	3513
	3	KOTA AMBON	871	6602	7473
	4	KEPULAUAN TANIMBAR	316	2581	2897
	5	BURU	687	2701	3388
	6	SERAM BAGIAN BARAT	848	4454	5302
	7	SERAM BAGIAN TIMUR	689	3329	4018
	8	KEPULAUAN ARU	199	1863	2062
	9	KOTA TUAL	227	1579	1806
	10	MALUKU BARAT DAYA	238	2055	2293
	11	BURU SELATAN	97	1010	1107
	<b>TOTAL</b>		<b>6.264</b>	<b>39030</b>	<b>45294</b>
<b>PAPUA</b>	1	JAYAPURA	292	145	437
	2	BIAK NUMFOR	277	157	434
	3	KEPULAUAN YAPEN	252	147	399
	4	MERAUKE	701	256	957
	5	NABIRE	484	205	689
	6	JAYAWIJAYA	56	31	87
	7	KOTA JAYAPURA	584	213	797
	8	PUNCAK JAYA	248	32	280
	9	MIMIKA	311	121	432
	10	SARMI	153	84	237
	11	KEEROM	289	110	399

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	12	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	692	44	736
	13	YAHUKIMO	487	32	519
	14	WAROPEN	149	69	218
	15	BOVEN DIGOEL	584	60	644
	16	MAPPI	1.080	103	1183
	17	ASMAT	30	44	74
	18	SUPIORI	79	56	135
	19	DOGIYAI	2.083	91	2174
	20	MAMBERAMO RAYA	2	32	34
	21	LANNY JAYA	748	48	796
	22	MAMBERAMO TENGAH	166	30	196
	23	NDUGA	193	29	222
	24	YALIMO	1	27	28
	25	PUNCAK	161	52	213
	26	PANIAI	165	48	213
	27	DEIYAI	721	46	767
	28	TOLIKARA	537	68	605
		<b>TOTAL</b>	<b>11.525</b>	<b>2379</b>	<b>13904</b>
<b>BANTEN</b>	1	PANDEGLANG	7.174	28353	35527
	2	LEBAK	7.191	28390	35581
	3	TANGERANG	14.859	64368	79227
	4	SERANG	11.595	42114	53709
	5	KOTA TANGERANG	7.941	37336	45277
	6	KOTA CILEGON	3.920	14103	18023

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	7	KOTA SERANG	4.196	16133	20329
	8	KOTA TANGERANG SELATAN	4.356	18118	22474
	<b>TOTAL</b>		<b>61.232</b>	<b>248915</b>	<b>310147</b>
<b>KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	1	BANGKA	1.768	8880	10648
	2	BELITUNG	1.042	5640	6682
	3	KOTA PANGKAL PINANG	882	5356	6238
	4	BANGKA BARAT	1.129	6379	7508
	5	BANGKA TENGAH	1.098	5884	6982
	6	BANGKA SELATAN	1.089	5774	6863
	7	BELITUNG TIMUR	867	4387	5254
	<b>TOTAL</b>		<b>7.875</b>	<b>42299</b>	<b>50174</b>
<b>GORONTALO</b>	1	BOALEMO	1.034	4917	5951
	2	GORONTALO	2.669	12653	15322
	3	KOTA GORONTALO	1.014	5004	6018
	4	PAHUWATO	1.249	5052	6301
	5	BONE BOLANGO	1.209	5707	6916
	6	GORONTALO UTARA	858	5841	6699
	<b>TOTAL</b>		<b>8.033</b>	<b>39174</b>	<b>47207</b>
<b>MALUKU UTARA</b>	1	HALMAHERA BARAT	454	3683	4137
	2	HALMAHERA TENGAH	267	1538	1805
	3	KOTA TERNATE	667	4306	4973
	4	HALMAHERA UTARA	612	4128	4740
	5	HALMAHERA SELATAN	909	4547	5456
	6	KEPULAUAN SULA	498	2620	3118

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	7	HALMAHERA TIMUR	522	3162	3684
	8	KOTA TIDORE KEPULAUAN	478	3388	3866
	9	PULAU MOROTAI	474	3228	3702
	10	PULAU TALIABU	740	2756	3496
	<b>TOTAL</b>		<b>5.621</b>	<b>33357</b>	<b>38978</b>
<b>PAPUA BARAT</b>	1	MANOKWARI	261	1862	2.123
	2	FAK FAK	60	952	1.012
	3	SORONG	378	3171	3.549
	4	KOTA SORONG	276	2103	2.379
	5	TELUK BINTUNI	141	1019	1.160
	6	TELUK WONDAMA	23	734	757
	7	KAIMANA	58	880	938
	8	SORONG SELATAN	191	1869	2.060
	9	RAJA AMPAT	56	772	828
	10	TAMBRAUW	185	1726	1.911
	11	MAYBRAT	65	749	814
	12	MANOKWARI SELATAN	34	838	872
	13	PEGUNUNGAN ARFAK	46	769	815
	<b>TOTAL</b>		<b>1.774</b>	<b>17442</b>	<b>19216</b>
<b>KEPULAUAN RIAU</b>	1	BINTAN	1.015	1938	2953
	2	KOTA BATAM	7.193	14533	21726
	3	KARIMUN	1.046	2443	3489
	4	NATUNA	529	1231	1760
	5	LINGGA	587	1319	1906
	6	KOTA TANJUNG PINANG	707	1824	2531

PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	PUS HAMIL	KELUARGA YANG PUNYA BADUTA	JUMLAH TARGET
	7	KEPULAUAN ANAMBAS	300	732	1032
	<b>TOTAL</b>		<b>11.377</b>	<b>24019</b>	<b>35396</b>
<b>SULAWESI BARAT</b>	1	POLEWALI MANDAR	2.917	4333	7250
	2	MAMASA	882	1452	2334
	3	MAJENE	1.565	2339	3904
	4	MAMUJU	1.683	2429	4112
	5	PASANGKAYU	1.390	2001	3391
	6	MAMUJU TENGAH	916	1253	2169
	<b>TOTAL</b>		<b>9.353</b>	<b>13807</b>	<b>23160</b>
<b>DKI JAKARTA</b>	1	JAKARTA PUSAT	1.513	4787	6.300
	2	JAKARTA UTARA	4.507	12596	17.103
	3	JAKARTA BARAT	5.089	12553	17.642
	4	JAKARTA SELATAN	5.346	13174	18.520
	5	JAKARTA TIMUR	10.214	23124	33.338
	6	KEPULAUAN SERIBU	197	700	897
	<b>TOTAL</b>		<b>26866</b>	<b>66.934</b>	<b>93.800</b>
<b>NASIONAL</b>			<b>1.445.537</b>	<b>6.625.217</b>	<b>8.070.754</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Soetriningsih

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

